



RENJA DP3AP2KB KOTA CIMAH I TAHUN 2024



Perkantoran Pemkot Cimahi Gedung C Lt. III
Jalan Rd. Demang Hardjakusumah
Telepon/ Fax (022) 6632338
Cimahi 40513 Jawa Barat

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI I

KATA PENGANTAR..... II

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG..... 1

1.2. LANDASAN HUKUM 3

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN..... 8

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN..... 9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA.... 11

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022 11

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD..... 41

2.3. ISI-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD..43

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....51

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DP3AP2KB.....67

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 67

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA 68

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024 69

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 85

4.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 85

4.2. RENCANA PAGU INDIKATIF 85

BAB V PENUTUP 85

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan, rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2024 Kota Cimahi dapat tersusun sesuai rencana.

Rencana Kerja (RENJA) disusun sebagai acuan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan pada anggaran 2024 yang mengacu pada realisasi kinerja tahun anggaran 2023, Renja merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan berbagai program dan kegiatan ditahun 2024.

Kami menyadari Rencana Kerja (RENJA) yang disusun ini, belum secara sempurna menggambarkan perencanaan yang ideal untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Cimahi serta pemberdayaan masyarakat namun demikian kami berharap Renja ini akan menjadi arah dan pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2024 Kota Cimahi.

Kami berharap melalui Rencana (RENJA) ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi dapat mewujudkan Rencana Pembangunan daerah Tahun 2023 – 2026. Visi Kota Cimahi yaitu Cimahi CERDAS.

Cimahi,

2024

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA
CIMAHI**



dr. FITRIANI MANAN, MKM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680101 199803 2 009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya upaya secara sadar dan terencana. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan, secara teknokratis, politis, partisipatif, dan top down/bottom up. Perencanaan yang disusun merupakan perencanaan partisipatif yang artinya disusun secara responsive berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan prosesnya melibatkan partisipasi masyarakat, yang mana partisipasi masyarakat tersalurkan dalam forum Grup Discusion yang melibatkan mitra kerja yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi yang selanjutnya disingkat menjadi DP3AKBP2A merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah Kota. Rencana Kerja DP3AP2KB merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan merupakan pelaksanaan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cimahi dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi tahun 2023 – 2026 serta Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi

Rencana Kerja DP3AP2KB adalah bagian dari Rencana Pembangunan daerah Kota Cimahi yang menguraikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dan merupakan implementasi RPD yang merinci langkah langkah yang akan diambil oleh Pemerintah Kota Cimahi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam RPD serta memuat berbagai rencana Program dan Kegiatan yang diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi DP3AP2KB serta selaras pula dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang menjadi pedoman dalam penyusunan seluruh rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan melaksanakan pengkajian dan analisa terlebih dahulu terhadap kondisi riil lapangan, evaluasi pelaksanaan rencana kerja sebelumnya sebelum terpisah menjadi dinas yang mandiri dalam hal urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana , pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat yang sebelumnya belum tergabung dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

Masalah kependudukan di Kota Cimahi menjadi permasalahan yang harus ditangani secara serius karena akan membawa dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan, masalah migrasi penduduk yang sangat dinamis juga laju pertumbuhan penduduk yang harus dapat dikendalikan mengingat Kota Cimahi mempunyai wilayah yang sangat terbatas, karenanya pelayanan keluarga berencana harus terus ditingkatkan dapat diakses secara mudah begitu juga halnya dengan kesehatan reproduksi yang terjangkau dan bermutu .

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga merupakan urusan yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi, masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak masih kerap terjadi di masyarakat terlebih pada masa pandemik karena permasalahan ekonomi akibat dampak covid sangat berpengaruh terhadap

prilaku seseorang, oleh sebab itu penanganan masalah tersebut serta pencegahannya harus terakomodir dalam program dan kegiatan yang ada.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi mengampu dua misi Wali Kota Cimahi, yaitu Misi 1 dan misi 5 dari 5 misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia cerdas, sehat dan unggul.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, professional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.
3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan dan mengimplementasikan kedua misi yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi maka disusunlah Rencana Kerja yang akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran DP3AP2KB Kota Cimahi Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja DP3AP2KB Kota Cimahi sebagai berikut :

A. Landasan Hukum Umum :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Cimahi;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2006, tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
11. Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
12. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
13. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023;
18. Permenpan RB Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan pelaksana bagi PNS
19. Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Admiistrasi kedalam Jabatan Fungsional;
20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2006, tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi
21. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 Tentang APBD Kota Cimahi Tahun 2022 LD. Nomor 288 . TLD Nomor 47 Tanggal 30 Desember 2021;
23. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Peragkat Daerah Kota Cimahi
24. Peraturan Wali Kota Cimahi nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 BD. 645, TBD Nomor 125 Tanggal 30 Desember 2021.

B. Landasan Hukum Material, terdiri dari :

a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 tentang Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat, dan Lembaga Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
17. Permen PP&PA No.11 Thn 2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA;
18. Peraturan menteri PPPA Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD Perlindungan PPPA;
19. Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak;

b. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
6. Undang Undang Nomor 52 tahun Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

7. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2017 Tentang kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

c. Urusan Pemberdayaan Masyarakat :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tetang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna
5. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
6. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Pengaturan dan Penetapan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja DP3AP2KB Kota Cimahi Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja DP3AP2KB Tahun 2024 adalah agar memiliki arah yang jelas dalam melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2024 dan untuk mewujudkan pencapaian program dan kegiatan, mewujudkan keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan mitra kerja terkait, mengoptimalkan sumber daya agar lebih efektif dan efisien serta menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan APBD DP3AP2KB Tahun Anggaran 2024.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Renja DP3AP2KB Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah dan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah.easoning dan telaahan terhadap capaian target awal tahun serta pendanaannya.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
Memuat tentang perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target Renstra Perangkat Daerah.
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Program Dan Kegiatan
- 4.2 Rencana Pagu Indikatif

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, demikian halnya dengan Rencana Kerja DP3AP2KB Kota Cimahi tahun 2022.

Evaluasi yang akan dilakukan terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi tahun 2022 mengacu pada pencapaian indikator program yang tertuang dalam Rencana Strategis dinas Tahun 2018-2022. Pada tahun 2022 anggaran yang diterima oleh DP3AP2KB Kota Cimahi berjumlah sebesar Rp. 17.705.598.242-. Belanja langsung dijabarkan untuk pendanaan program dan kegiatan yang terdiri dari 10 Program dan 23 Kegiatan 54 Sub Kegiatan.

Realisasi yang dicapai pada tahun 2022 secara keseluruhan dari belanja sebesar Rp. 13.852.285.742 terealisasi sebesar Rp. 17.705.598.242 atau sebesar 78,24% . Realisasi penyerapan terkendala karena adanya keterlambatan juknis terkait pelaksanaan satu kegiatan sehingga berakibat tidak maksimalnya penyerapan anggaran sebesar 21, 76% serta adanya efesiensi belanja serta hasil negosiasi. Hasil Evaluasi ini diharapkan dapat memberi gambaran dan langkah langkah yang harus ditempuh oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi pada tahun 2023 yang akan datang.

Belanja langsung tersebut dibagi kedalam tiga urusan yang diampu oleh DP3AP2KB Kota Cimahi yaitu :

- a. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan alokasi anggran sebesar Rp. 7.327.958.000,- terdiri dari 3 program dan 8 kegiatan, 22 Sub Kegiatan. Sasaran dari pelaksanaan urusan ini adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam keluarga

berencana dengan realisasi sebesar Rp. 5.293.353.757,- atau sebesar 72,24%..

- b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.364.878.700,-. Terdiri dari 4 Program dan 6 kegiatan 7 Sub Kegiatan. Dengan realisasi sebesar Rp. 1.229.085.423 atau sekitar 90,05%. Sasaran urusan ini adalah meningkatnya pengarusutamaan gender, meningkatnya perlindungan perempuan, terpenuhinya penyediaan data gender dan anak , meningkatnya pemenuhan hak anak.
- c. Urusan kesekretariatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.114.473.742,- Terdiri dari 1 program dan 7 kegiatan 16 Sub kegiatan Realisasi sebesar Rp.6.495.387.913 atau sekitar 80,05% Sasaran urusan ini adalah Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum bagi unit kerja, meningkatnya ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi , meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan .

1. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target :

- a. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)
- b. Rasio Akseptor KB Mandiri
- c. Cakupan PUS (Pasangan Usia Subur) <20 tahun

2. Realisasi Program /Kegiatan Yang tidak memenuhi target :

Terdapat 9 indikator kinerja Program yang berhasil mencapai target kinerja 100% yaitu :

- a. Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan Administrasi umum
- b. Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi
- c. Capaian LAKIP
- d. Jumlah keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga
- e. Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu
- f. Persentase data gender dan anak yang dimanfaatkan dalam perencanaan Pembangunan
- g. Rata- rata jumlah anak per keluarga
- h. Prosentase kelurahanyang terbina

- i. Prosentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan aktif

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target Kinerja hasil

Terdapat 7 Indikator program yang melebihi target yaitu :

- a. Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
- b. Posentase anak yang terlayani kebutuhan dasar
- c. Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKB
- d. Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKR
- e. Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKL
- f. Cakupan kepesertaan keluarga dalam UPPKS
- g. Cakupan kepesertaan keluarga dalam PIK R/M

4. Faktor - Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

4.1. Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi umum bagi unit kerja

Untuk indikator kinerja pertama yakni persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum indikator ini tercapai realisasi kinerja 100 %. Indikator ini mendukung tersedianya pelayanan umum meliputi pelayanan sarana dan prasarana untuk menunjang keberlangsungan dan kelancaran admistrasi di semua unit kerja yang ada di DP3AP2KBA meliputi penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. Indikator ini dapat tercapai 100 % karena merupakan kegiatan rutin untuk memfasilitasi kebutuhan organisasi serta tidak ada kendala yang dihadapi .

4.2. Meningkatnya ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi

Indikator kinerja yang kedua adalah Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi. Indikator ini merupakan indikator yang baru yang menjadi sasarannya adalah meningkatnya ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi denga harapan untuk lebih meningkatkan profesionalisme pegawai yang ada di DP3AP2KBA.

Capaian Kinerja 100% Ketersediaan ASN yang sesuai dengan kompetensi sangatlah terbatas, namun melalui segala bentuk penambahan wawasan melalui bintek ataupun pelatihan diharapkan mampu mengimbangi kesesuaian, karenanya berbagai upaya dilakukan untuk mendukung kompetensi ASN agar sesuai dengan harapan, sedangkan untuk tahun tahun sebelumnya indikatornya berbeda hanya jumlah ASN yang terbina saja.

4.3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan

Indikator kinerja untuk sasaran strategis berikutnya Capaian Nilai LAKIP, sebagai OPD baru yang baru terpisah dari DINSOSP2KBP3A, jadi untuk merencanakan target dan capaian kinerjanya bisa diambil dari historis realisasi kinerja dari organisasi induknya yaitu DP3AP2KB. Namun sampai laporan ini dibuat pihak terkait yang berwenang memberikan nilai LAKIP belum bisa mengeluarkan nilai tersebut. Namun secara keseluruhan capaian kinerja DP3AP2KB sudah cukup baik sehingga diharapkan target kinerja secara keseluruhan dapat tercapai.

4.4. Meningkatnya kemandirian akseptor KB

Indikator kinerja berikutnya yang dievaluasi adalah meningkatnya rasio akseptor KB dari target 80 % tercapai 78,41 % tercapai kinerja 98%. Indikator ini tidak memenuhi capaian kinerja maksimal karena banyaknya factor yang menjadi penyebabnya, diantaranya adalah banyaknya pasangan usia subur yang baru menikah sehingga mereka tidak ber KB dikarenakan tidak ingin menunda kehamilan dan meningkatnya angka DO. Hal ini bukan berarti kinerja bidang KB menurun akan tetapi banyak hal yang diluar kewenangan dan tanggung jawab DP3AP2KB yang tidak bias dihindari. Akan tetapi pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang ketercapaian indicator ini telah dilaksanakan dengan maksimal.

4.5. Meningkatnya Pengendalian Penduduk

Indikator kinerja Rasio Akseptor KB Mandiri untuk tahun ini tidak memenuhi capaian target kinerja salah satu penyebabnya adalah

Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB banyak yang memanfaatkan pelayanan KB Gratis yang diberikan oleh BKKBN yang menaikan target sasaran, selain itu dimungkinkan adanya factor ekonomi akibat imbas dari covid 19 yang dampaknya masih terasa dimasyarakat sehingga masyarakat mencari yang tidak mengeluarkan biaya untuk pemasangan alat kontrasepsi.

4.6. Terkendalinya jumlah anak dalam setiap keluarga

Indikator kinerja berikutnya yang dievaluasi adalah rata rata jumlah anak per keluarga yang tercapai 100%. Ini menunjukkan bahwa pasangan usia subur yang ada di Kota Cimahi rata rata mempunyai anak antara 2 sampai 3 orang, hal tersebut menunjukkan semakin sadarnya masyarakat untuk membatasi jumlah anak dalam keluarga mereka demi mewujudkan keluarga sejahtera. Petugas lini lapangan bisa berbangga dengan capaian indicator ini.

4.7. Meningkatnya Pengendalian Penduduk

Indikator Unmet Need capaian kinerja tahun 2022 hanya mencapai 65% sama halnya dengan capaian indicator yang lain yang tidak memenuhi target capaian kinerja disebabkan adanya pergantian system di BKKBN Pusat semula pelaporannya menggunakan data Udgredad (angka) saja, tetapi berdasarkan hasil pelaporan yang baru yang harus mencantumkan by name by adres yang memuat keterangan yang lebih rinci anatara lain tentang data diri, demografi, data kepesertaan ber KB dan data pembangunan keluarga (Ketahanan Keluarga, Kemiskinan Ekstrem/Kepemilikan asset, Keluarga beresiko stunting) terkait pasangan usia subur termaksud, sehingga jumlah capaian data menurun hampir disemua indicator KB dan ini tidak saja di Kota Cimahi akan tetapi berdampak pada capaian indicator KB secara nasional.

Capaian ini berarti bukan berarti pelayanan KB tidak maksimal hanya saja perlu diketahui bahwa penduduk Kota Cimahi mobilitasnya sangat tinggi laju yang datang dan yang keluar dari Kota Cimahi sangatlah tinggi terlebih di daerah daerah industri.

4.8. Meningkatnya Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Indikator kinerja berikutnya yang dievaluasi adalah Cakupan Pasangan Usia subur < 20 Tahun dengan realisasi sebesar 88 % walaupun capaian indikator ini tidak maksimal bukan berarti kinerja Bidang KB DP3AP2KBA menurun tetapi karena adanya transisi pemakainan system yang baru dalam pelaporan dari BKKBN Pusat.

4.9. cakupan kepesertaan keluarga dalam BKB

Indikator kinerja cakupan kepesertaan keluarga dalam BKB merupakan indikator baru yang harus dievaluasi dan hasil kinerja diperoleh sebesar 468 % dari target 12,39% dengan capaian kinerja sebesar 58,07% angka ini diperoleh dari hasil pendataan keluarga yang dilaksanakan di tahun 2022. Ini membuktikan bahwa kepesertaan keluarga mengikuti Bina Keluarga Balita naik signifikan fenomena ini didukung juga oleh senangnya masyarakat terutama ibu ibu untuk berkumpul dan bersosialisasi , pengetahuan ibu ibu muda sangat meningkat tentang tata cara pola asuh anak, keingintahuan mereka didukung juga dengan kemudahan mengakses berbagai informasi dari medsos terkait dengan pola asuh anak sehingga ketercapaian BKB sangat tinggi.

4.10. cakupan kepesertaan keluarga dalam BKR

Indikator kinerja Cakupan Kepesertaan keluarga dalam BKR atau Bina Keluarga Remaja dengan target sebesar 14,46 % tercapai sebesar 36,17% jadi capaian kinerja sebesar 250% capaian ini menunjukkan berhasilnya KIE (Konseling, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh DP3AP2KBA Kota Cimahi.

4.11. Meningkatnya cakupan kepesertaan keluarga dalam BKL

Indikator kinerja Cakupan Kepesertaan keluarga dalam BKL atau Bina Keluarga Lansia dengan target sebesar 11,66 % tercapai sebesar 57,37% capaian kinerja sebesar 402% capaian ini menunjukkan berhasilnya KIE (Konseling, Informasi dan Edukasi)

dengan sasaran usia lanjut usia yang dilakukan oleh DP3AP2KBA Kota Cimahi.

4.12. Meningkatnya cakupan kepesertaan keluarga dalam UPPKS

Indikator kinerja Cakupan Kepesertaan keluarga dalam UPPKS sangatlah tinggi dari target 0,38% tercapai 0,59% sehingga capaian kinerja mencapai 155%, ketercapaian indikator ini didukung oleh banyak faktor terlebih dimasa pandemic setiap keluarga akan berusaha untuk bertahan hidup dan menaikkan pendapatan keluarga dengan berbagai cara tanpa harus keluar rumah (juala on line) peran media sosial dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan keluarga, serta optimalnya pelaksanaan KIE kepada masyarakat.

4.13. Meningkatnya cakupan kepesertaan keluarga dalm PIK R/M

Indikator kinerja Cakupan Kepesertaan keluarga dalam PIK R/M (Pusat Informasi Keluarga Remaja dan Mahasiswa) tercapai sagat bagus , dari target 1,26 bisa tercapai sebesar 8,64% jadi capaian kinerja sebesar 685% , sama halnya dengan tribina (BKR, BKB, dan BKL) kepesertaan keluarga dalam PIK dipengaruhi oleh berbagai hal, namun ini lebih menunjukan kerja keras dari petugas lini lapangan dalam menyebarkan informasi , sosialisasi dan edukasi kesemua sasaran berhasil dengan baik serta banyaknya waktu luang yang dimiliki oleh para remaja dan mahasiswa akibat penerapan Pembelajaran Jarak Jauh mendorong sebagian remaja mencari aktivitas lain seperti PIK R/M.

4.14. Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak

Indikator Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar mempunyai target 90% , indikator ini hanya dihitung dari ketiga kebutuhan dasar anak yang harus dilayani yaitu kebutuhan pendidikan dasar (SD, SMP dan SMA) dengan hasil ketercapaian sebesar 97% , kebutuhan akan pelayanan imunisasi dasar dicapai sebesar 92,2% dan kebutuhan ketersediaan akta kelahiran dicapai dengan sebesar 98% sehingga ketercapaian kinerja indikator ini mencapai 107%. Dari ketiga pemenuhan kebutuhan dasar anak

tersebut maka capaian kinerja mencapai 107 %, ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Cimahi senantiasa hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

4.15. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

Indikator Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah ditargetkan sebesar 33% pada tahun 2022 tercapai sebesar 60,65 % dengan capaian kinerja sebesar 183 % hasil ini diperoleh dengan cara menghitung jumlah ASN perempuan dibagi jumlah keseluruhan jumlah ASN yang ada di Pemkot Cimahi. Ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan khususnya di Pemkot Cimahi cukup tinggi, perempuan bisa meyakinkan semua pihak bahwa dia mampu untuk mengambil peran pada pemerintahan.

4.16. Terfasilitasinya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Indikator Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan di P2TP2A ditargetkan 100% dan tercapai 100% artinya semua pengaduan yang diterima oleh P2TP2A Kota Cimahi selalu diselesaikan dan tertangani seluruhnya. Penanganan dan pelayanan yang diberikan tidak saja pada pendampingan psikologis, pendampingan psiko sosial akan tetapi sampai pada tahapan pendampingan hukum dan medis juga. Selama tahun 2022 terdapat 78 pengaduan kasus kekerasan meliputi kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 33 kasus dan 45 kasus kekerasan terhadap anak. Ke 78 kasus tersebut telah mendapatkan penanganan di P2TP2A sehingga capaian kinerjanya mencapai 100 %. Hal ini membuktikan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dalam penanganan kasus antara P2TP2A dan Bidang yang menangani permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik koordinasi internal dan eksternal.

4.17. Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender

Indikator selanjutnya yang dievaluasi adalah persentase data gender dan anak yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan, realisasi kinerja indikator ini tercapai 100% dari target 100% dengan asumsi bahwa data gender dan anak dipakai dalam menentukan perencanaan pembangunan dan pada tahun 2022 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB telah selesai menyusun data terpilah gender sehingga bisa dijadikan bahan referensi bagi perencanaan.

4.18. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

Indikator selanjutnya yang dievaluasi adalah persentase keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga, realisasi kinerja indikator ini tercapai 100% dari target 100%. Perlu kami informasikan bahwa Program dan kegiatan ini mempunyai sasaran 100 Keluarga binaan di Lokasi P2WKSS dengan harapan setelah mereka diberikan pelatihan keterampilan , ilmu pengetahuan dan wawasan dapat meningkatkan perekonomian sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan bagi Mereka.

Tabel 2.1.a
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DP3AP2KB dan Pencapaian Renstra DP3AP2KB s.d. Tahun 2023
Kota Cimahi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Rencana Strategis 2017 - 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kelengkapan Penunjang PD	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan monev yang disusun	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%

					Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
					Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	Jumlah Dokumen Evaluasi PD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	100 %	14 Bulan	14 Bulan	100 %
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										

					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah ASN yang dibina	33 orang	33 Orang	33 Orang	33 Orang	100 %	33 Orang	33 Orang	100 %
					Administrasi Umum Perangkat Daerah									
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, listrik dan air	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
					Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah bulan fasilitasi kunjungan Tamu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %

					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah bulan fasilitasi perjalanan dinas dan koordinasi, dan konsultasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah unit fasilitas tempat yang disewa	2 gedung	2 gedung	2 gedung	2 gedung	100 %	2 gedung	2 gedung	100 %
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, listrik dan air	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100%

					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah bulan fasilitasi perbaikan peralatan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah bulan fasilitasi Pembayaran jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas	Jumlah Bulan fasilitasi penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan operasional atau lapangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
					PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN									

					Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG (7 prasyarat penilaian APE : komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, SDM, data dan sistem informasi, metode dan partisipasi masyarakat/kerja sama	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %
					Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota									
					Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	100 %	5 kegiatan	5 kegiatan	100 %
					Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									

					Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)												
					Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota												
					Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah fasilitasi pengembangan KIE pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %			
					PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN												

					Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota														
					Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah bulan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %					
					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK														
					Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
					Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	jumlah dokumen data terpilah gender yang Kota cimahi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %					

					PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)														
					Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
					Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah advokasi pemenuhan hak anak	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %					
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	jumlah dokumen hasil evaluasi koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan hak anak	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %					
					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA														

					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa												
					Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah dokumen profil desa	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	100 %	15 dokumen	15 dokumen	100 %			
					Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan Kelurahan penataan,	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %			
					PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT												
					Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota												

					Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100 %	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100 %
					Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah fasilitas Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 %	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 %

[illegible]

					Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah Bulan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)Jumlah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
					Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	-	-	-	-	-	-	-	-
					PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK									
					Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk									
					Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang	jumlah fasilitasi pembentukan sekolah siaga kependudukan	2 sekolah	2 sekolah	2 sekolah	2 sekolah	100 %	2 sekolah	2 sekolah	100 %

[illegible]

					Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah fasilitasi advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10 Bulan	6 Bulan	6 Bulan	6 Bulan	60 %	6 Bulan	6 Bulan	60 %
					Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	10 Bulan	6 Bulan	6 Bulan	6 Bulan	60 %	6 Bulan	6 Bulan	60 %
					Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	10 Bulan	6 Bulan	6 Bulan	6 Bulan	60 %	6 Bulan	6 Bulan	60 %
					Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian	Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan operasional dan sarana di Balai Penyuluhan	10 Bulan	6 Bulan	6 Bulan	6 Bulan	60 %	6 Bulan	6 Bulan	60 %

					Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kabupaten/ Kota	Jumlah bulan fasilitasi pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	10 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	100 %	6 bulan	6 bulan	60 %
					Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah akseptor MKJP terlayani	1125 akseptor	1125 akseptor	1125 akseptor	1125 akseptor	100 %	1125 akseptor	1125 akseptor	100 %
					Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Pasar Rakyat	Jumlah paket sarana penunjang pelayanan KB yang disediakan	1 paket	1 paket	1paket	1 paket	100 %	1 paket	1 paket	100 %

					Sub Kegiatan pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah fasilitasi pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan	10 bulan	10 bulan	10 bulan	10 bulan	100 %	10 bulan	10 bulan	100 %
					Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah fasilitasi dukungan operasional pelayanan KB bergerak	200 akseptor	200 akseptor	200 akseptor	200 akseptor	100 %	200 akseptor	200 akseptor	100 %
					Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB									
					Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah fasilitasi pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di Kampung KB	10 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	100 %	6 bulan	6 bulan	60 %

					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)														
					Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga														
					Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah unit BKB Kit Stunting yang disediakan	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	100 %	20 Unit	20 Unit	100 %					
					Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah bulan penyediaan operasional bagi pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga	10 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	60 %	6 bulan	6 bulan	60 %					

				Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah fasilitasi promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	100 %	5 kegiatan	5 kegiatan	100 %
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah fasilitasi promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %
				Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									

					Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah fasilitasi promosi dan sosialisasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %
--	--	--	--	--	---	---	------------	------------	------------	------------	-------	------------	------------	-------

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam pelaksanaan kewenangan urusan-urusan yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi menargetkan pelaksanaan kewenangan pelayanan terhadap masyarakat dalam urusan Perlindungan Anak dan perempuan, Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat daam bentuk Indikator Kinerja Utama yaitu :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama DP3AP2KB Kota Cimahi :

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Tahun Ke-		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang seimbang	Total Fertility rate (TFR)	2,33%								
2.	Meningkatkan kesetaraan Gender dalam pembangunan	Meningkatnya Pengarus utamaan Gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IDG)	92,70%								
			Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	74,00%								
3.	Meningkatnya Pemenuhan hak hak anak	Meningkatnya Pemenuhan hak hak anak	Tingkat capaian KLA	575								
1	Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang	CPR (Contraceptive Prepelace rate)		79%							

2	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam pembangunan	Persentase Indikator penilaian APE		Prata ma	50%	100%					
		Meningkatnya Pemenuhan Hak Hak Anak	Persentase Indikator Penilaian KLA yang dipenuhi		Prata ma	50%	70,60 %					

Perlu kami informasikan

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan :

1. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu :
 - a. Rasio Akseptor KB Mandiri capaiannya 98 %
 - b. Rata rata jumlah anak perkeluarga 100 %
 - c. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi 65%
 - d. Cakupan PUS dibawah< 20 Tahun 88 %
 - e. Cakupan kepesertaan dalam BKB 468%
 - f. Cakupan Kepesertaan dalam BKR 250%
 - g. Cakupan Kepesertaan dalam BKL 402%
 - h. Cakupan Kepesertaan dalam UPPKS 155%
 - i. Cakupan Kepesertaan Keluarga dalam PIK R/M 685%
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu :
 - a. Persentase Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah 183%
 - b. Jumlah Keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga 100%
 - c. Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu 100%
 - d. Persentase data gender data gender yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan 100 %
 - e. Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar 107%
3. Urusan Pemberdayaan masyarakat, yaitu :
 - a. Persentase kelurahan yang terbina 100%
 - b. Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan aktif 100%

2.3. Isi-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan keluarga berencana, DP3AP2KB Kota Cimahi mengacu dan memperhatikan pada kebijakan di tingkat Nasional dan Propinsi, Tugas pokok yang diharapkan bias semakin focus pada bidang kerjanya dan tentu saja memiliki tanggungjawab yang sangat luas dan kompleks mengingat urusan yang diampu lebih dari satu urusan .

Meskipun demikian, sudah menjadi kewajiban bagi semua jajaran dalam organisasi untuk melaksanakan tugas pokok tersebut. Pada konteks tersebut, ditegaskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok yang diemban maka DP3AP2KB mempunyai beberapa fungsi utama dan strategik, yaitu:

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat;

- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur secara legal-formal dalam Peraturan yang ada, maka sebagai suatu organisasi perangkat daerah, DP3AP2KB dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam mengemban amanahnya mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak, Pemberdayaan Masyarakat serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Selanjutnya, dalam memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan tugas pokok dan fungsi dari Disdagkoperin, maka Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris dan tiga orang Kepala Bidang. Hal itu sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

• **Sekretariat terdiri atas:**

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Program dan Keuangan.

• **Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** sebagaimana dimaksud terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

- **Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** sebagaimana dimaksud terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

- **Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal terdiri atas:

- a. Seksi Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
- b. Seksi Pemberdayaan Keluarga; dan
- c. Seksi Pengembangan Potensi dan Ekonomi Masyarakat.

Jabatan Fungsional

Seiring dengan diberlakukannya Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, maka jabatan structural yang semula ada di setiap Bidang menjadi jabatan fungsional yang disesuaikan dengan nama jabatan yang sesuai dengan peraturan tersebut.

Setiap Bidang mempunyai jabatan Fungsional tertentu yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya seperti halnya sebelum Permenpan tersebut diberlakukan. Harapannya adalah agar setiap ASN mempunyai kompetensi dan profesionalisme yang sesuai dengan kebutuhan. Jabatan fungsional saat ini tidak terikat pada pekerjaan dan tupoksinya saja, akan tetapi bisa melaksanakan tugas lain diluar tugas pokok dan fungsi sesuai kebutuhan dan apabila dibutuhkan oleh organisasinya ataupun oleh SKPD lain.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, DP3AP2KB Kota Cimahi mengacu dan memperhatikan pada kebijakan dari tingkat Nasional hingga Provinsi, sebagai berikut:

A. Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Hak Anak

Perempuan dan anak-anak sebagai kelompok masyarakat yang diidentikkan dengan kelompok masyarakat yang mempunyai posisi yang lemah, baik secara historis, budaya, maupun kondisi fisik, serta tidak mempunyai kapasitas untuk mampu membuat keputusan bahkan bagi dirinya sendiri. Pemikiran dasar tersebut membedakan konsep pemberdayaan perempuan dari konsep pemberdayaan masyarakat, bukan *empowerment* yang berkaitan dengan kekuasaan, namun cenderung

sebagai sebuah upaya meningkatnya akses perempuan terhadap berbagai sumberdaya (ekonomi, politil, sosial, budaya, dll) dan meningkatnya kemampuan perempuan di berbagai bidang (pendidikan, keterampilan, dll). Sedangkan 'empowerment' dari kata 'empower' artinya member kuasa, atau makna yang dipahami dalam kerangka penelitian WEMC (2006) adalah peningkatan kapasitas untuk membuat keputusan mandiri yang mengubah hubungan kekuasaan-kekuasaan yang tidak dikehendaki.

Perlindungan diberikan secara khusus kepada perempuan dan anak-anak karena perannya yang sangat besar bagi masa depan bangsa sebagai pendidik utama bagi generasi penerus bangsa da generasi bangsa yang lebih berkualitas menuju Indonesia yang dicita-citakan.

Kesetaraan gender menurut UNESCO adalah suatu kondisi dimana semua manusia (baik laki-laki maupun perempuan) bebas mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh *stereotype*, peran gender yang kaku. Hal ini bukan berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus selalu sama, tetapi hak, tanggung jawab dan kesempatannya tidak dipengaruhi oleh apakah mereka dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Kesetaraan Gender adalah hasil dari ketiadaan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atas dasar kesempatan, alokasi sumber daya atau manfaat dan akses terhadap pelayanan. Keadilan gender adalah keadilan dalam memperlakukan memperlakukan perempuan dan laki-laki sesuai kebutuhan mereka. Hal ini mencakup perlakuan yang setara atau perlakuan yang berbeda karena mereka punya kebutuhan yang berbeda, baik secara biologis maupun konstruksi sosial budaya.

Kesetaraan gender dilakukan dengan terus mendorong optimalisasi peran perempuan sesuai dengan kemampuan, kapasitas, bakat, minat, serta keistimewaan-keistimewaan yang dimilikinya baik secara psikis maupun fisik.

Pemberdayaan perempuan meliputi berbagai bidang yaitu ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan perempuan sebagai ibu dalam keluarga yang penting dalam pembentukan karakter bangsa.

Pemberdayaan perempuan dilakukan dengan mendorong peran aktif perempuan untuk mendayagunakan potensinya untuk mengintervensi anggota masyarakat lainnya untuk lebih peduli terhadap

lingkungan, tidak menikah pada usia dini karena kesiapan mental dan ekonomi yang belum matang, serta melakukan inisiasi kepada masyarakat untuk membangun karakter bangsa yang positif. Sasaran pemberdayaan perempuan bukan hanya perempuan, namun juga laki-laki karena budaya patriarki yang mengakar kuat mempengaruhi keadilan gender.

Hal penting yang harus menjadi pokok pemberdayaan perempuan adalah:

1. Pentingnya peran ayah dan ibu di dalam tumbuh kembang anak dan menjaga serta melindungi anak dari tindak pelecehan dan kekerasan.
2. Pentingnya meningkatkan keterwakilan perempuan di bidang politik bukan hanya untuk memenuhi kuota 20% keterwakilan perempuan namun merupakan peluang strategis untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan.
3. Pentingnya meningkatkan peran perempuan di bidang ekonomi mikro, kecil, dan menengah.
4. Pentingnya perempuan dan anak perempuan mendapatkan akses di berbagai aspek kehidupan.
5. Pentingnya meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak perempuan maupun anak laki-laki.

B. Perencanaan Keluarga

Pembangunan manusia yang lebih berkualitas dan makmur membutuhkan sumberdaya yang baik dalam jumlah dan kualitas yang cukup. Keterbatasan sumberdaya mengharuskan adanya perencanaan yang matang dalam pertumbuhan kuantitas penduduk sehingga tercapai kualitas manusia yang diharapkan. Setiap orang mempunyai peran yang penting dalam perencanaan pertumbuhan kuantitas dan kualitas penduduk.

Hal strategis yang penting diperhatikan adalah:

Keterkaitan kependudukan dan pembangunan berkelanjutan, faktor dinamika kependudukan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

1. Kualitas penduduk dan penyiapan generasi mendatang pembangunan kependudukan terkait erat dengan pembangunan kualitas SDM pembangunan SDM menjadi isu sentral dalam

pembangunan nasional. Pembangunan kependudukan terkait erat dengan pembangunan kualitas SDM, dan Pembangunan SDM menjadi isu sentral dalam pembangunan nasional.

2. Desentralisasi, Pembangunan Kependudukan memiliki keterikatan yang sangat kuat antara global, Nasional dan Daerah.
3. Hak dan kewajiban dari Pemerintah, pemerintah Daerah serta Penduduk dalam pengelolaan Perkembangan Kependudukan.
4. Sanksi yang dikaitkan insentif dan disinsentif baik kepada pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
5. Keberhasilan pembangunan kependudukan sangat tergantung pada seluruh komponen yang ada baik pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat Partisipasi & keperdulian seluruh komponen tersebut dapat dipengaruhi oleh adanya sanksi yang dikaitkan dengan insentif & disinsentif.
6. Pemberdayaan keluarga. Pemberdayaan keluarga sangat berkaitan erat dengan pembangunan keluarga berkualitas dan akhirnya menentukan kualitas penduduk secara keseluruhan.
7. Pengelolaan kelahiran, penurunan kematian dan Pengarahan mobilitas penduduk Penurunan kematian dan Pengarahan mobilitas penduduk Ketiga issue tersebut harus diintervensi secara terpadu dengan program yang tepat dalam rangka peningkatan kualitas penduduk dan akhirnya berdampak pada pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan dilakukan dengan mengurangi disparitas atau ketimangan pembangunan baik itu antar wilayah maupun antar masyarakat (pemerataan dan keadilan), **memberdayakan masyarakat** dan mengentaskan kemiskinan, menciptakan atau menambah lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, mempertahankan atau menjaga kelestarian sumberdaya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang.

Pembangunan yang utama adalah pembangunan manusia yang diarahkan pada kemandirian bangsa untuk kehidupan yang lebih baik, sejajar dengan bangsa yang lain. Manusia yang dicita-citakan adalah berkepribadian, berakhlak mulia, dan mempunyai pendidikan yang tinggi . Dengan demikian tidak akan terjadi lagi tindakan – tindakan yang

merugikan dan merendahkan manusia lainnya yang memiliki beraneka ragam perbedaan, serta secara efektif dan bersama sama mampu mewujudkan hidup yang sejahtera secara moral dan materil .

Kemandirian bangsa atau masyarakat dilakukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam seluruh bidang pembangunan yang di bangun dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu dengan meningkatkan kualitas pemerintahan terutama di tingkat paling dekat dengan masyarakat, kelurahan, mengembangkan kelembagaan yang ada di masyarakat, meningkatkan kegiatan-kegiatan yang mendukung ekonomi produktif, mengembangkan adat-istiadat dan budaya local, serta meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan mengembangkan teknologi yang tepat guna.

Kemandirian masyarakat yang berproses dan telah dilaksanakan mencerminkan paradigma pembangunan yang *people-centered*, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable*. Pemberdayaan masyarakat diupayakan melalui :

1. Penciptaan iklim dan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
2. *Empowering*, memperkuat potensi atau daya saing yang dimiliki masyarakat.
3. *Protecting*, mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Strategi dalam memberdayakan masyarakat adalah pemberdaan masyarakat, perluasan kesempatan, serta pengembangan perlindungan .

C. Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan dilakukan dengan mengurangi disparitas atau ketimangan pembangunan baik itu antar wilayah maupun antar masyarakat (pemerataan dan keadilan), **memberdayakan masyarakat** dan mengentaskan kemiskinan, menciptakan atau menambah lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, mempertahankan atau menjaga kelestarian sumberdaya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang.

Pembangunan yang utama adalah pembangunan manusia yang diarahkan pada kemandirian bangsa untuk kehidupan yang lebih baik, sejajar dengan bangsa yang lain. Manusia yang dicita-citakan adalah

berkepribadian, berakhlak mulia, dan mempunyai pendidikan yang tinggi . Dengan demikian tidak akan terjadi lagi tindakan – tindakan yang merugikan dan merendahkan manusia lainnya yang memiliki beraneka ragam perbedaan, serta secara efektif dan bersama sama mampu mewujudkan hidup yang sejahtera secara moral dan materil .

Kemandirian bangsa atau masyarakat dilakukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam seluruh bidang pembangunan yang di bangun dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu dengan meningkatkan kualitas pemerintahan terutama di tingkat paling dekat dengan masyarakat, kelurahan, mengembangkan kelembagaan yang ada di masyarakat, meningkatkan kegiatan-kegiatan yang mendukung ekonomi produktif, mengembangkan adat-istiadat dan budaya local, serta meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan mengembangkan teknologi yang tepat guna.

Isu Strategis dirumuskan dari beberapa kondisi penting yang menjadi perhatian serius dalam pembangunan Adapun isu-isu strategis terkait masalah Pemberdayaan Masyarakat meliputi:

1. Kurang sinergisnya program/kegiatan pembangunan daerah berlokasi di Kelurahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat maupun dengan kabupaten/kota, masih bersifat parsial/sektoral.
2. Kecenderungan menurunnya budaya gotong royong dalam bentuk interaksi secara langsung pada masyarakat desa dan perkotaan yang diindikasikan oleh mulai berubahnya bentuk partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.
3. Belum optimalnya Penganggaran: CSR dan Crowdfunding untuk memberikan alternatif metode penganggaran pada programprogram perdesaan melalui dana CSR dan penggalangan dana melalui jaringan internet.
4. Belum maksimalnya pengelolaan profil kelurahan sebagai bahan penyusunan perencanaan.

Strategi dalam memberdayakan masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, perluasan kesempatan, serta pengembangan perlindungan .

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Perubahan Renstra DP3AP2KB Kota Cimahi dan tingkat kinerja yang dicapai Disdagkoperin dengan mengacu pada prioritas program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Kota Cimahi Tahun 2024 dengan tema pembangunan yaitu “Pemantapan Stabilitas Perekonomian dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia”.

Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk DP3AP2KB dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi yang fokus terhadap program prioritas Kota Cimahi Tahun serta misi pada RPD 2023 – 2026 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DP3AP2KB yaitu misi ke-2: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah Yang Berkeadilan dan misi ke 1: Mewujudkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Rancangan awal RKPD yang ada berasal dari usulan program dan kegiatan tahun yang lalu dan Rancangan awal RKPD tahun 2024, sedangkan program dan kegiatan hasil analisa kebutuhan adalah program-program dan kegiatan yang diusulkan setelah dilakukan pembahasan yang lebih mendalam dengan melakukan sinkronisasi dan isu-isu penting terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas serta kinerja kegiatan yang belum tercapai maksimal pada Renstra sebelumnya.

Review dari hasil analisis dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan, secara lengkap review terhadap RKPD Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel IKK berikut:

No	Rancangan Awal RKPD					Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai Sakip, Nilai IKM, Indeks Profesionalitas ASN,	B, B, 50,2		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai Sakip, Nilai IKM, Indeks Profesionalitas ASN,	B, B, 50,2		
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai Sakip	B		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai Sakip	B		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	64.700.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	65.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12 Dokumen	Rp. 23.985.650	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12 Dokumen	175.000.000	
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai Sakip	B		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai Sakip	B		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan ASN yang difasilitasi gaji dan tunjangan	12 Bulan	Rp. 6.283.840.760	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan ASN yang difasilitasi gaji dan tunjangan	12 Bulan	Rp. 6.283.840.760	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD;	12 Laporan	Rp. 47.751.750	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD;	12 Laporan	50.000.000	
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Profesionalisme ASN	50%		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Profesionalisme ASN	50%		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	60 Orang	Rp. 56.845.240	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	60 Orang	60.000.000	
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai IKM Perangkat Daerah	B		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai IKM Perangkat Daerah	B		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket komponen instansi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Laporan	Rp. 11.653.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket komponen instansi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Laporan	15.000.000	
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	55.000.000	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	175.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Laporan	8.009.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Laporan	55.000.000	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Laporan	79.957.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Laporan	90.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Laporan	58.080.200	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	11.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	174.930.000	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000	
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit	108.100.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit	120.000.000	
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana yang dipelihara	100%		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana yang dipelihara	100%		

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah fasilitasi jasa komunikasi, air dan listrik	12 Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah fasilitasi jasa komunikasi, air dan listrik	12 Laporan	60.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	45.780.000	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	55.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan fasilitasi pelayanan umum kantor	12 Laporan	200.108.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan fasilitasi pelayanan umum kantor	12 Laporan	95.000.000	
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100%		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	279.174.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	350.000.000	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	69%		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	69%		

8.	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG (7 prasyarat penilaian APE : komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, SDM, data dan sistem informasi, metode dan partisipasi masyarakat/kerja sama	1 dokumen		Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG (7 prasyarat penilaian APE : komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, SDM, data dan sistem informasi, metode dan partisipasi masyarakat/kerja sama	1 dokumen		
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	174.999.850	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	220.000.000	
9.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Fasilitas Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Kegiatan		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Fasilitas Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Kegiatan		
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil sosialisasi Peningkatan Partisipasi perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	5 dokumen	Rp. 221.910.750	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil sosialisasi Peningkatan Partisipasi perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	5 dokumen	300.000.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Perempuan yang mendapat Penanganan Terpadu	100%		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase Perempuan Korban Kekerasan Perempuan yang mendapat Penanganan Terpadu	100%		
10.	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang	Kota Cimahi, Semua Kecamatan,	Jumlah bulan Fasilitas Kegiatan P2TP2A	12 Bulan		Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang	Kota Cimahi, Semua Kecamatan,	Jumlah bulan Fasilitas Kegiatan P2TP2A	12 Bulan		

Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kelurahan				Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kelurahan				
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Korban kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	15 Orang	359.099.950	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Korban kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	15 Orang	400.000.000	
Program Peningkatan Kualitas Keluarga		Cakupan keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga	100%		Program Peningkatan Kualitas Keluarga		Cakupan keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga	100%		
Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah fasilitasi Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan		Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah fasilitasi Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan		
Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota		Jumlah dokumen hasil pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kab/kota	4 dokumen		Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota		Jumlah dokumen hasil pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kab/kota	4 dokumen	450.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase perangkat daerah yang memiliki data terpilah gender;	75%	405.649.700	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase perangkat daerah yang memiliki data terpilah gender;	75%		
Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah fasilitasi Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah fasilitasi Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Penyediaan Data Gender Dan Anak Di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua	Jumlah Dokumen Data Gender Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 dokumen	Rp. 74.999.500	Penyediaan Data Gender Dan Anak Di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua	Jumlah Dokumen Data Gender Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 dokumen	90.000.000	

	Kecamatan, Semua Kelurahan					Kecamatan, Semua Kelurahan					
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Anak Yang Terlayani Kebutuhan Dasar	89%		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Anak Yang Terlayani Kebutuhan Dasar	89%			
Pelebagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	12 bulan		Pelebagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	12 bulan			
Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	10 organisasi	Rp. 131.100.000	Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	10 organisasi	140.000.000		
Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Rp. 94.687.600	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	100.000.000		
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu;	100%		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase anak korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu;	100%			
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang	Kota Cimahi,	Fasilitasi Jumlah Pencegahan Kekerasan			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang	Kota Cimahi,	Fasilitasi Jumlah Pencegahan Kekerasan				

	Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah advokasi dan pendampingan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Rp. 127.305.950		Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah advokasi dan pendampingan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak		175.000.000	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kelurahan yang terbina administrasi pemerintahan	100%		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase kelurahan yang terbina administrasi pemerintahan	100%		
13.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah fasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	4 kegiatan		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah fasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	4 kegiatan		
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	15 dokumen	17.680.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	15 dokumen	80.000.000	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	2 kegiatan	190.000.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	2 kegiatan	220.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%		

	MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kelurahan				MASYARAKAT HUKUM ADAT					
14.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat yang aktif	100%		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat yang aktif	100%		
	Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1).Jumlah dokumen hasil penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	(1). 5 dokumen;	429.808.000	Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1).Jumlah dokumen hasil penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	(1). 5 dokumen;	600.000.000	
	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1).Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	(1). 75 Lembaga;	135.869.800	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1).Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	(1). 75 Lembaga;	250.000.000	
	Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga	Kota Cimahi, Semua	(1).Jumlah sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan	(1). 75 unit;	1.907.975.000	Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga	Kota Cimahi, Semua	(1).Jumlah sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan	(1). 75 unit;	330.000.000	

	kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kecamatan, Semua Kelurahan	desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kecamatan, Semua Kelurahan	desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapat asli desa	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1).Jumlah hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapat asli desa	(1). 1 dokumen	54.999.900	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapat asli desa	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1).Jumlah hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapat asli desa	(1). 1 dokumen	60.000.000	
	Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1).Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;	(1). 3 Laporan	190.000.000	Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1).Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;	(1). 3 Laporan	300.000.000	
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1).Jumlah laporan fasilitasi Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa;	(1). 1 Kegiatan		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1).Jumlah laporan fasilitasi Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa;	(1). 1 Kegiatan		
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1).Jumlah dokumen hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;	(1). 4 dokumen	499.999.800	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1).Jumlah dokumen hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;	(1). 4 dokumen	440.000.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1). Rata - rata jumlah anak perkeluarga (2). Unmeet Need (persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi)	(1).2,3 (2). 12,5 %		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		(1). Rata - rata jumlah anak perkeluarga (2). Unmeet Need (persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi)	(1).2,3 (2). 12,5 %		
15.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan	Kota Cimahi,	Fasilitasi sekolah siaga kependudukan	2 sekolah		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan	Kota Cimahi,	Fasilitasi sekolah siaga kependudukan	2 sekolah		

Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Advokasi, Sosialisasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal Di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI Dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal Dan Informal	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	(1) 2 Satuan Pendidikan	80.000.000	Advokasi, Sosialisasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal Di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI Dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal Dan Informal	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	(1) 2 Satuan Pendidikan	100.000.000		
Sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta modal solusi strategis peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah organisasi yang mengikuti sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta modal solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	(1).20 Organisasi;	26.000.000	Sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta modal solusi strategis peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah organisasi yang mengikuti sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta modal solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	(1).20 Organisasi;	33.000.000		
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen data mikro keluarga	1 dokumen		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen data mikro keluarga	1 dokumen			
Penyediaan Data Dan Informasi Keluarga	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	20 organisasi	569.174.700	Penyediaan Data Dan Informasi Keluarga	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	20 organisasi	550.000.000		
PROGRAM PEMBINAAN	Kota	Rasio akseptor KB MKJP	35,92%		PROGRAM PEMBINAAN		Rasio akseptor KB MKJP	35,92%			

	KELUARGA BERENCANA (KB)	Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				KELUARGA BERENCANA (KB)					
16.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Calon akseptor yang telah mendapatkan informasi dan edukasi	1000 orang		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Calon akseptor yang telah mendapatkan informasi dan edukasi	1000 orang		
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kader yang mengikuti penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	390 Orang	885.537.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kader yang mengikuti penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	390 Orang	1.000.000.000	
	Fasilitasi pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, Pelayanan, dan pengembangan Program Bangga kencana untuk petugas Keluarga Berencana atau Penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan Falitasi pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, Pelayanan, dan pengembangan Program Bangga kencana untuk petugas Keluarga Berencana atau Penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		516.299.000	Fasilitasi pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, Pelayanan, dan pengembangan Program Bangga kencana untuk petugas Keluarga Berencana atau Penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan Falitasi pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, Pelayanan, dan pengembangan Program Bangga kencana untuk petugas Keluarga Berencana atau Penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		575.000.000	
18.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1).jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	(1).1 unit;		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1).jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	(1).1 unit;		
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kota Cimahi, Semua Kecamatan,	(2).Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak;	(1). 2 Laporan;	200.017.000	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kota Cimahi, Semua Kecamatan,	(2).Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak;	(1). 2 Laporan;	220.000.000	

		Semua Kelurahan				Semua Kelurahan				
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah fasilitasi pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	1 tahun		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah fasilitasi pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	1 tahun	
	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan	2 laporan	56.447.400	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan	2 laporan	70.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1) Cakupan PUS <20 tahun (2). Cakupan kepesertaan dalam BKB,BKR, BKL,UPPKS PIK-R/M	(1). 0,35 (2).47.5, 27.5, 29,72. 0.9 dan 9,16		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		(1) Cakupan PUS <20 tahun (2). Cakupan kepesertaan dalam BKB,BKR, BKL,UPPKS PIK-R/M	(1). 0,35 (2).47.5, 27.5, 29,72. 0.9 dan 9,16	
20.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif	419 kelompok		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif	419 kelompok	
	Promosi Dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1). Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	7 Laporan	145.587.450	Promosi Dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1). Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	7 Laporan	110.000.000
	Promosi Dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan	Kota Cimahi,	(1).Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi	2 Laporan	87.340.250	Promosi Dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan	Kota Cimahi,	(1).Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi	2 Laporan	175.000.000

	Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		
21.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1 kegiatan		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1 kegiatan	
	Promosi Dan Sosialisasi Program Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Bagi Mitra Kerja	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan 19 Organisasi	145.230.850	Promosi Dan Sosialisasi Program Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Bagi Mitra Kerja	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 Laporan 19 Organisasi	175.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai salah satu upaya dalam rangka menampung aspirasi dan usulan dari masyarakat setiap tahun selalu diadakan musrenbang dengan harapan bahwa hasil dari musrenbang dapat tertuang ke dalam Rencana Kerja Dinas. Walaupun dengan keterbatasan anggaran yang ada dimaksimalkan keinginan dari masyarakat dapat diselaraskan dengan kebutuhan pada rencana kerja dinas guna mendukung cita-cita pembangunan Kota Cimahi.

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang yang dimulai dari Musrenbang tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan. Perencanaan kegiatan pada Disdagkoperin Kota Cimahi mendasar pada:

- a. Program Dinas berdasarkan usulan dari data teknis terkait tugas pokok dan fungsi, yaitu:
 - a) Program Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan;
 - b) Program Perlindungan Perempuan;
 - c) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
 - d) Program Pengelolaan Data Gender dan Anak;
 - e) Program Pemenuhan Hak Anak;
 - f) Program Perlindungan Khusus Perempuan;
 - g) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 - h) Program Administrasi Pemerintahan Desa;
 - i) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
 - j) Program Pengendalian Penduduk;
 - k) Program Pembinaan Keluarga Berencana;
 - l) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);

b. Usulan Dari Masyarakat Dengan Mekanisme Musrenbang

Usulan dari masyarakat kepada DP3AP2KB secara garis besar sudah diakomodir dalam program dan kegiatan pada Renja Tahun 2024, namun mengingat sangat terbatasnya anggaran di DP3AP2KB, usulan dari masyarakat belum seluruhnya dapat diakomodir sesuai usulan terbanyak dan melihat kebutuhan yang paling penting dan mendasar bagi masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DP3AP2KB

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan Nasional sudah seharusnya menjadi pedoman yang harus dijadikan dasar pengambilan keputusan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan diselaraskan dengan arah pembangunan Kota Cimahi. Arah kebijakan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2020 - 2024

7 Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020 - 2024

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dari 7 Poin Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020 - 2024, point 3 terkait dengan tugas pokok dan fungsi DP3AP2KB yang dideskripsikan sebagai berikut:

Poin 3 . Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

1. Mewujudkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dalam mencapai tujuannya harus senantiasa didukung oleh berbagai sumber daya yang memadai agar bisa memberikan pelayanan yang optimal.

Sesuai dengan visi Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2023-2026 yaitu **"CIMAHI CERDAS"**, DP3AP2KB Kota Cimahi turut bertanggungjawab untuk mewujudkan visi tersebut sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

Berdasarkan penjabaran atas misi Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026, DP3AP2KB Kota Cimahi mendukung dan sangat terkait dengan misi ke-1 serta misi 5 yaitu:

- **Misi Kesatu : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul**

Misi kesatu tersebut diidentifikasi kembali sehingga disusunlah tujuan serta sasaran perangkat daerah terkait, dengan harapan dapat mewujudkan misi kesatu secara efektif dan efisien tanpa meninggalkan sisi kualitas pelaksanaan program dan kegiatan. Berikut tujuan serta sasaran dari Misi Ketiga:

Tujuan:

1. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sasaran:

1. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender
2. Meningkatnya Perlindungan terhadap Anak
3. Pengendalian Penduduk yang sesuai dengan daya tampung Kota

Berpijak pada keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026, DP3AP2KB akan mengimplementasikan strategi serta arah kebijakan yang dapat mewujudkan tujuan serta sasaran yang sudah ditetapkan yang dibagi menjadi beberapa bagian yang sangat terkait dengan tugas pokok serta fungsi dari DP3AP2KB:

Strategi

1. Meningkatkan kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Meningkatkan Perlindungan Anak
3. Penguatan dan Pemaduan pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas
4. Meningkatkan kualitas Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah

ARAH KEBIJAKAN

1. Meningkatkan kelembagaan pengarusutamaan gender
2. Meningkatkan Perlindungan dan tumbuh kembang Anak
3. Meningkatkan Mengembangkan inovasi Promosi Keluarga Berencana
4. Meningkatkan Mengembangkan inovasi Promosi Keluarga Berencana
5. Peningkatan Kualitas layanan Administrasi pemerintahan daerah
6. Peningkatan Kualitas layanan Administrasi pemerintahan daerah
7. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah

3.3 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024

Melihat hasil evaluasi dari masing-masing bidang dan evaluasi efektifitas anggaran dan evaluasi kebutuhan yang sejalan dengan RPJPD Perubahan maka disusun program, kegiatan, dan sub-kegiatan akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada RPD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 – 2026 Rencana Strategis DP3AP2KB TA 2023-2026, RKPD 2024, serta mengakomodir hasil masukan dari masyarakat yang tertuang dalam hasil Musrenbang Tahun 2024.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip, Nilai IKM, Indeks Profesionalitas ASN,	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B, B, 50,2				B, B, 50,2	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B				B	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	64.700.000	APBD		2 Dokumen	65.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	Rp. 23.985.650	APBD		12 Dokumen	175.000.000
	Kegiatan Administrasi	Nilai Sakip	Kota Cimahi,	B				B	

				Keuangan Perangkat Daerah		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan ASN yang difasilitasi gaji dan tunjangan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	Rp. 6.283.840.760	APBD		12 Bulan	7.850.000.000	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD;	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	Rp. 47.751.750	APBD		12 Laporan	50.000.000	
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50%				50%		
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Orang	Rp. 56.845.240	APBD		60 Orang	60.000.000	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B				B		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instansi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	Rp. 11.653.000	APBD		12 Laporan	15.000.000	
				Penyediaan Peralatan Dan	Jumlah Paket Peralatan	Kota Cimahi,	12	55.000.000	APBD		12	175.000.000	

				Perlengkapan Kantor	dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan				Laporan	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	8.009.000	APBD		12 Laporan	55.000.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	79.957.000	APBD		12 Laporan	90.000.000
				Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	58.080.200	APBD		12 Laporan	75.000.000
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	9.000.000	APBD		12 Laporan	11.000.000
				Penyelenggaraan Rapat Kordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	174.930.000	APBD		12 Laporan	200.000.000
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%				100%	
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Cimahi, Semua	2 Unit	108.100.000	APBD		2 Unit	120.000.000

					yang disediakan	Kecamatan, Semua Kelurahan						
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana yang dipelihara	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%				100%	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah fasilitasi jasa komunikasi, air dan listrik	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	50.000.000	APBD		12 Laporan	60.000.000
				Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	45.780.000	APBD		12 Laporan	55.000.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan fasilitasi pelayanan umum kantor	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	200.108.200	APBD		12 Laporan	95.000.000
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%				100%	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 unit	279.174.400	APBD		15 unit	350.000.000
				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN	persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga	Kota Cimahi, Semua	69%				69%	

				GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemerintah	Kecamatan, Semua Kelurahan						
				Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG (7 prasyarat penilaian APE : komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, SDM, data dan sistem informasi, metode dan partisipasi masyarakat/kerja sama	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokume n				1 dokumen	
				Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokume n	174.999.850	APBD		1 Dokumen	220.000.000
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Kegiatan				5 Kegiatan	
				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah dokumen hasil sosialisasi Peningkatan Partisipasi perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 dokume n	Rp. 221.910.750	APBD		5 dokumen	300.000.000
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Perempuan yang	Kota Cimahi, Semua Kecamatan,	100%				100%	

					mendapat Penanganan Terpadu	Semua Kelurahan						
				Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bulan Fasilitas Kegiatan P2TP2A	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan				12 Bulan	
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Orang	359.099.950	APBD		15 Orang	400.000.000
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%				100%	
				Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah fasilitas Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kegiatan				1 kegiatan	
				Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kab/kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 dokumen				4 dokumen	450.000.000
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER	Persentase perangkat daerah yang memiliki data	Kota Cimahi, Semua	75%	405.649.700	APBD		75%	

				DAN ANAK	terpilah gender;	Kecamatan, Semua Kelurahan						
				Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
				Penyediaan Data Gender Dan Anak Di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	Rp. 74.999.500	APBD		1 dokumen	90.000.000
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Anak Yang Terlayani Kebutuhan Dasar	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 Persen				89 Persen	
				Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bulan fasilitasi pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan				12 bulan	
				Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 organisasi	Rp. 131.100.000	APBD		10 organisasi	140.000.000

				Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	Rp. 94.687.600	APBD		1 dokumen	100.000.000
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu;	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%				100%	
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
				Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah advokasi dan pendampingan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Rp. 127.305.950	APBD			175.000.000
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan yang terbina administrasi pemerintahan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%				100%	
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 kegiatan				4 kegiatan	
				Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Kota Cimahi, Semua	15 dokumen	17.680.000	APBD		15 dokumen	80.000.000

						Kecamatan, Semua Kelurahan	n						
					Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 kegiatan	190.000.000			2 kegiatan	220.000.000
					PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemsyarakatan yang aktif	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%				100%	
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemsyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat yang aktif	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%				100%	
					Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna),	(1).Jumlah dokumen hasil penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna),	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1). 5 dokumen ;	429.808.000	APBD		(1). 5 dokumen;	600.000.000

				Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat							
				Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	(1).Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1). 75 Lembaga;	135.869.800	APBD		(1). 75 Lembaga;	250.000.000
				Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	(1).Jumlah sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1). 75 unit;	1.907.975.000	APBD		(1). 75 unit;	330.000.000
				Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapat asli desa	(1).Jumlah hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapat asli desa	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1). 1 dokumen	54.999.900	APBD		(1). 1 dokumen	60.000.000
				Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	(1).Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1). 3 Laporan	190.000.000	APBD		(1). 3 Laporan	300.000.000
				Fasilitasi Bulan Bhakti	(1).Jumlah laporan	Kota Cimahi,	(1). 1				(1). 1	

				Gotong Royong Masyarakat	fasilitasi Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa;	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kegiatan				Kegiatan	
				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	(1).Jumlah dokumen hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1). 4 dokumen	499.999.800	APBD		(1). 4 dokumen	440.000.000
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	(1). Rata - rata jumlah anak perkeluarga (2). Unmeet Need (persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1).2,3 (2). 12,5 %				(1).2,3 (2). 12,5 %	
				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Fasilitasi sekolah siaga kependudukan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 sekolah				2 sekolah	
				Advokasi, Sosialisasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal Di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI Dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal Dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1) 2 Satuan Pendidikan an	80.000.000	APBD		(1) 2 Satuan Pendidikan	100.000.000
				Sosialisasi tentang pemanfaatan kajian	Jumlah organisasi yang mengikuti sosialisasi	Kota Cimahi, Semua	(1).20 Organisa	26.000.000	APBD		(1).20 Organisasi;	33.000.000

				dampak kependudukan beserta modal solusi strategis peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta medel solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	Kecamatan, Semua Kelurahan	si;					
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen data mikro keluarga	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen				1 dokumen	
				Penyediaan Data Dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 organisasi	569.174.700	APBD		20 organisasi	550.000.000
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio akseptor KB MKJP	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,92%				35,92%	
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Calon akseptor yang telah mendapatkan informasi dan edukasi	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000 orang				1000 orang	
				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader yang mengikuti penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	390 Orang	885.537.000	APBD		390 Orang	1.000.000.000
				Fasilitasi pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, Pelayanan, dan	Jumlah bulan Falitasi pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, Pelayanan,	Kota Cimahi, Semua Kecamatan,		516.299.000	APBD			575.000.000

				pengembangan Program Bangsa kencana untuk petugas Keluarga Berencana atau Penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	dan pengembangan Program Bangsa kencana untuk petugas Keluarga Berencana atau Penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Semua Kelurahan						
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	(1).jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1).1 unit;				(1).1 unit;	
				Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	(2).Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak;	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1). 2 Laporan;	200.017.000	APBD		(1). 2 Laporan;	220.000.000
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	Jumlah fasilitasi pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun				1 tahun	
				Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	Jumlah laporan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 laporan	56.447.400	APBD		2 laporan	70.000.000
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN	(1) Cakupan PUS <20 tahun	Kota Cimahi, Semua	(1). 0,35 (2).47,5,				(1). 0,35 (2).47,5,	

				PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	(2). Cakupan kepesertaan dalam BKB,BKR, BKL,UPPKS PIK-R/M	Kecamatan, Semua Kelurahan	27.5, 29,72. 0.9 dan 9,16				27.5, 29,72. 0.9 dan 9,16	
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	419 kelompok	PROGRAM PENGELOLAAN			419 kelompok	
				Promosi Dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	(1). Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Laporan	145.587.450	APBD		7 Laporan	110.000.000
				Promosi Dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	(1).Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	87.340.250	APBD		2 Laporan	175.000.000
				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah fasilitasi pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kegiatan				1 kegiatan	
				Promosi Dan Sosialisasi	Jumlah Laporan Hasil	Kota Cimahi,	1	145.230.850	APBD		1 Laporan	175.000.000

					Program Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Bagi Mitra Kerja	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan 19 Organisasi					19 Organisasi	
--	--	--	--	--	---	--	----------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	---------------	--

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi Tahun 2024 disusun sebagai pedoman atau acuan bagi pelaksanaan kegiatan kegiatan tahun 2024 oleh setiap Bidang, ini menunjukkan agar dalam pengajuan setiap kegiatan harus disesuaikan dengan perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tahapan tahapan setiap tahunnya.

1.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Pada DP3AP2KB Kota Cimahi deselaraskan dengan Rencana strategis DP3AP2KB tahun 2023 – 2026. Pada tahun anggaran 2024, DP3AP2KB mengelola 12 Program 23 Kegiatan 44 Sub Kegiatan dengan total anggaran Rp.

1.2 Rencana Pagu Indikatif

Rencana Penganggaran Program dan Kegiatan DP3AP2KB Tahun 2024 dalam tabl. 4.2 telah disusun memperhitungkan perkiraan maju

Tabel 4.2

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Indikatif Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Dana/Pagu Indikatif Renja 2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan:	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.700.000

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.958.650
2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	
	Sub Kegiatan:	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.283.840.760
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	47.751.750
3	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	
	Sub Kegiatan:	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	58.845.240
4	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	
	Sub Kegiatan:	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.653.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.009.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.957.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.080.200
	Penyediaan Kunjungan Tamu	9.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.930.000
5	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
	Sub Kegiatan:	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan	45.780.000

	Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.108.200
6	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
	Sub Kegiatan:	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	279.174.400
II	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
1	<i>Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	
	Sub Kegiatan :	
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	174.999.850
2	<i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	
	Sub Kegiatan :	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	221.910.750
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
1	<i>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	
	Sub Kegiatan :	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	359.099.950

IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
1	<i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesertaan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</i>	
	Sub Kegiatan :	
	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	405.649.700
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
1	<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	
	Sub Kegiatan :	
	Penyediaan Data Gender Dan Anak Di Kewenangan Kabupaten/Kota	74.999.500
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
1	<i>Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	
	Sub Kegiatan :	
	Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	131.100.000
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	94.687.600
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	

1	<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	
	Sub Kegiatan :	
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	127.305.950
VIII	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
1	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	
	Sub Kegiatan :	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	17.680.000
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	190.000.000
IX	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
1	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	
	Sub Kegiatan :	
	Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang	429.808.000

	Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	135.869.800
	Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.907.975.000
	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapat asli desa	54.999.900
	Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	190.000.000
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	499.999.800
X	PENGENDALIAN PENDUDUK	
1	<i>Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</i>	
	Sub Kegiatan :	
	Advokasi, Sosialisasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal Di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI Dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal Dan Informal	80.939.550
	Sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta modal solusi strategis peringatan dini dampak	26.088.750

	kependudukan kepada pemangku kepentingan	
2	<i>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	
	Sub Kegiatan :	
	Penyediaan Data Dan Informasi Keluarga	569.174.700
XI	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
1	<i>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB)</i>	
	Sub Kegiatan :	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	885.537.000
	Fasilitasi pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, Pelayanan, dan pengembangan Program Bangga kencana untuk petugas Keluarga Berencana atau Penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	516.299.000
2	<i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten / Kota</i>	
	Sub Kegiatan :	
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	200.017.000
3	<i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB</i>	
	Sub Kegiatan :	
	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja lainnya	56.447.400

	dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	
XII	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
1	<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	
	Sub Kegiatan :	
	Promosi Dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	87.340.250
	Promosi Dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	144.587.450
2	<i>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	
	Sub Kegiatan :	
	Promosi Dan Sosialisasi Program Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Bagi Mitra Kerja	145.230.850

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi yang selanjutnya disingkat menjadi DP3AP2KB Tahun 2024 disusun sebagai pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2024.

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi tahun 2024 terdiri dari 12 Program, 23 Kegiatan dan 44 sub Kegiatan. Jumlah Rencana Anggaran Tahun 2024 Secara keseluruhan berjumlah Rp. 15.285.662.950,-

Pelaksanaan rencana kerja tergantung sepenuhnya kepada kebijakan yang akan dilaksanakan, serta sejauh mana kinerja serta dukungan sumber daya yang dimiliki baik sarana maupun prasarana yang ada, Kaidah-kaidah yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan rencana kerja tersebut, sebagai berikut :

1. Melakukan sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaanya bersumber dari dana APBD, APBN dan sumber lainnya harus membuat rencana kerja yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.
2. Menjaga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, Kepala DP3AP2KB wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan tahun 2024 melalui upaya koreksi dan penyampaian hasil evaluasi kepada Pj.Walikota melalui kepala Bappeda setiap Triwulan.
3. Melakukan koordinasi yang maksimal dengan semua pihak yang mempunyai keterkaitan program dan kegiatan baik secara vertikal maupun interen sehingga ketercapaian program dan kegiatan bisa sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Demikian rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi kamisusun sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan program dan Kegiatan ditahun 2024.

f. **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA CIMAHI,**



dr. FITRIANI MANAN, MKM
Pembina Utama Muda
NIP. 9680101 199803 2 009